

**RENCANA AKSI  
PERJANJIAN KINERJA  
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Hukum</b>	<b>3,07</b>												
	Rencana Aksi:													
	a. Pengembangan Aplikasi JDIH			Pengembangan Aplikasi JDIH	Sosialisasi pengembangan JDH ke Anggota JDH Setjen DPR	Penyempurnaan Aplikasi JDIH	Penyempurnaan Aplikasi JDIH	Monitoring pengelolaan JDIH	Monitoring pengelolaan JDIH	Evaluasi atas monitoring pengelolaan JDIH				
	b. Bimtek Penyusunan Keputusan (SK) untuk unit kerja			Bimtek Penyusunan SK						Bimtek Penyusunan SK				Bimtek Penyusunan SK
	c. Coaching Klinik Advokasi Hukum		Coaching Klinik Hukum	Coaching Klinik Hukum	Coaching Klinik Hukum	Coaching Klinik Hukum	Coaching Klinik Hukum	Coaching Klinik Hukum	Coaching Klinik Hukum					
	d. Peningkatan kompetensi hukum				pelaksanaan Peningkatan kompetensi hukum					pelaksanaan Peningkatan kompetensi hukum				
	e. Survey Internal Layanan Hukum										Persiapan survey (Penentuan responden, metode survey dan menyusun konsep pertanyaan)	Pelaksanaan survey	Pengolahan data hasil survey dan penyusunan laporan hasil survey	tindak lanjut hasil survey
<b>2</b>	<b>Persentase capaian pembentukan produk hukum</b>	<b>100%</b>												
	Rencana Aksi:													
	a. Pembentukan Persekjen		Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan/ pembahasan/ penetapan/ evaluasi Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan/ pembahasan/ penetapan/ evaluasi Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan/ pembahasan/ penetapan/ evaluasi Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persekjen	Penyusunan/ pembahasan/ penetapan/ evaluasi Persekjen
	b. Evaluasi Proleg							Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Prioritas Tahunan	Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Prioritas Tahunan					
<b>3</b>	<b>Persentase Pengaduan Masyarakat yang</b>	<b>100%</b>												
	Rencana Aksi:													
	a. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat													
	1. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS)		Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SIDUMAS					
	2. Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp		Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp					
	b. kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan ke DPR RI dan Sekretariat Jenderal		Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat.					
	c. Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat		Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat					
<b>4</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>92%</b>												
	Rencana Aksi:													
	Melakukan revisi anggaran					Melakukan revisi anggaran yang belum terserap								
	Realisasi anggaran sesuai action plan		Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan		Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi anggaran sesuai action plan	Realisasi mencapai target 92%